**PEMBERDAYAAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Anshari Rizal**

Email : ansharirizal4597@yahoo.com

(Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

**ABSTRACT**

*Children with special needs (ABK) are children who have special characteristics and are different from children, they are unable to show mental, transitional or physical disabilities. Education inclusive is one of other ways to empower the effective children with special needs related to education as the basis for development and community empowerment. Payakumbuh City Government made a policy to organize an inclusive education program in the City of Payakumbuh. The researcher in this study used qualitative research methods, descriptive by finding inductive.After conducting research, it can be seen that the implementation of inclusive education program in Payakumbuh City has gone well despite having several problems such as a lack of public knowledge about inclusive education program, unclear regulatory rules about funding and budgeting and the unclear rules governing the construction of infrastructure,. Lack of socialization, inability of schools to implement inclusive education program, the existence of positive and negative attitudes from educators, so that empowerment of children with special needs becomes less effective.In this study, researchers suggested through more government attention so that inclusive education program can be better organized both in terms of employment and knowledge so that what is expected can be realized that is, empowering children with special needs through inclusive education program.*

*Keywrods: empowrment, Children with special needs (ABK), Inclusive Education.*

**ABSTRAK**

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang mempunyai karakteristik khusus dan berbeda dengan anak sebagaimana umumnya, mereka tidak mampu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi maupun fisik. Pendidikan inklusif merupakan salah satu cara dalam memberdayakan anak berkebutuhan khusus yang efektif dikarenakan pendidikan menjadi dasar dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif di Kota Payakumbuh belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa masalah seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program pendidikan inklusif, belum jelasnya aturan pendanaan dan penganggaran untuk program serta belum jelasnya aturan pembuatan sarana prasarana. Kurangnya sosialisasi, ketidakmampuan sekolah melaksanakan program pendidikan inklusif, adanya sikap positif dan negatif dari tenaga pendidik,sehingga pemberdayaan anak berkebutuhan khusus menjadi kurang efektif. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan melalui perhatian pemerintah yang lebih sehingga program pendidikan inklusif dapat lebih tertata rapi baik dari segi pendannaan maupun kepengerusuan sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud yaitunya memberdayakan anak berkebutuhan khusus melalui program pendidikan inklusif

Kata Kunci : Pemberdayaan, Anak Berkebutuhan Khusus, Program Pendidikan Inklusi

Kesejahteraan adalah suatu hal yang menjadi indikator berhasil atau tidaknya suatu Negara menjalankan sistem pemerintahannya. Untuk menciptakan kesejahteraan di perlukan SDM yang bermutu dan memiliki kualitas untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik agar mampu berbicara banyak dihadapan dunia. Salah satu cara untuk mencapai SDM yang memiliki mutu dan kualitas tersebut melalui peningkatan taraf pendidikan nasional sesuai dengan cita cita dari Negara Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinia ke-4 yang menerangkan bahwasannya salah satu cita-cita bangsa adalah untuk mencerdaskan bangsa.

Undang-Undang 1945 pasal 31 tersebut telah jelas bahwasannya setiap warga Negara harus mendapatkan hak pendidikan tidak terkecuali ABK. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam hal pendidikan, semua mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dalam pelaksaan pendidikan.

Mengantisipasi hal tersebut, Program pendidikan inklusif di anggap perlu karena pendidikan yang layak dan perlakuan setara dengan anak normal pada umumnya juga harus didapatkan oleh anak berkebutuhan khusus. Masyarakat juga harus memberikan perhatian kepada anak berkebutuhan khusus baik yang sudah mengikuti pendidikan inklusif atau yang belum melaksanakannya.

Dalam pelaksanaan banyak permasalahan diduga disebabkan oleh berbagai permasalahan termasuk diantaranya kondisi sosial budaya . permasalahan terbesar dalam pengembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah dari sosial dan masyarakat. Masyarakat terkhususnya orang tua dari ABK merasa malu dikarenakan memiliki anak yang cacat. Sehingga anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik menjadi terhambat di karenakan masalah orang tua yang merasa malu akan anaknya bersekolah. Padahal anak berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh penyetaraan dalam hal pendidikan bahkan seharusnya memiliki hak lebih di karenakan mereka memiliki kebutuhan khusus untuk melaksanakan pendidikan. Hal ini tentu saja menjadi peran pemerintah untuk bisa menyadarkan orang tua bahwasannya ABK khusus juga harus memperoleh pendidikan yang layak.

**Fokus**

1. Bagaimana pemberdayaan ABK melalui program pendidikan inklusif di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa upaya dalam mewujudkan pemberdayaan bagi ABK yang efektif dan mengatasi permasalahan dalam program pendidikan inklusif untuk ABK di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat?

**Tujuan**

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusf di kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat .
2. Untuk mengetahui upaya untuk mewujudkan pemberdayaan bagi anak berkebutuhan khusus yang efektif dan mengatasi hambatan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus

**Manfaat**

1. Bagi praja untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan teknik pemerintahan dan diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi praja yang akan melakukan magang riset terapan pemerintahan.
2. Bagi lembaga IPDN untuk menambah informasi sebagai tambahan literatur dan karya ilmiah yang terdapat dalam perpustakaan dalam program studi pembangunan dan pemberdayaan.
3. Bagi pemerintah Kota Payakumbuh untuk menerima saran teoriti dan praktis untuk perbaikan praktik pemerintahan dan diharapkan mampu memberikan solusi kepada pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.
4. Bagi masyarakat sebagai informasi untuk dapat memberdayakan anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusif diharapkan dapatkan meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Penulis dalam penelitian ini menggunakan konsep atau teori Pemberdayaan masyarakat yang dikemukaan oleh Bryan dan White (1989:25) bahwa, proses peningkatan kemampuan, pemecahan masalah, pemberian kepercayaan, pengelolaan program, merupakan dimensi untuk mewujudkan pemberdayaan yang efektif.

Metode yang digunakan penulis dalam laporan magang ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik analisis data menggunakan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta menggunakan pendekatan induktif. teknik pengumpulan data dikombinasikan dengan triangulasi analisis data menggunakan induktif / kualitatif**.** Dalam metode meneliti kualitatif, pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

1. **Peningkatan Kemampuan**

Menurut Bryan dan White peningkatan kemampuan merupakan salah satu indikator dari suksesnya tercapai pemberdayaan, hasil observasi dilapangan dam hasil wawancara penulis yang sudah di lakukan pelaksanaan pendidikan inklusif ini telah membuat perubahan pada anak berkebutuhan khusus yang tentu saja peran GPK sangat diperlukan dalam mengontrol ABK, yang tadinya merasa malu dengan teman seumurannya yang normal kini mereka telah mampu untuk berbaur.

Pelaksanaan Pendidikan Inklusif sebagai suatu proses pembelajaran di Kota Payakumbuh didahului dengan proses penerimaan dan penyeleksian dikarenakan tidak semua anak disabilitas mampu melaksanakan pendidikan di sekolah inklusif.

Setelah pelaksanaan proses assesmen tentu saja proses belajar mengajar pun dapat berlangsung dibantu dengan Guru Pendamping Khusus (GPK) yang menjadi salah satu syarat khusus dalam pelaksaan program pendidikan inklusif, tentu saja hal ini berguna dalam hal pemberian motivasi yang merupakan salah satu indikator tercapainya proses pembelajaran yang baik, guru pendamping khusus selalu mendampingi anak berkebutuhan khusus untuk memberikan motivasi dan dukungan moril secara langsung kepada anak berkebutuhan khusus, dan tentu saja untuk membantu lancarnya pelaksanaan pendidikan inklusif, karna ketika guru biasa menerangkan pelajaran guru pendamping khusus yang akan membantu anak berkebutuhan khusus dalam menerima materi dan apabila masih belum dapat dipahami oleh anak berkebutuhan khusus maka akan diberikan pelajaran tambahan oleh Guru Pendamping Khusus sehingga antara Guru biasa dan Guru Pendamping Khusus mereka dapat saling berbagi tugas dan pelaksanaan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik.

1. **Pengelolaan Program**

Kurikulum yang dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Payakumbuh pada dasarnya tetap menggunakan kurikulum standar nasional yang dipakai di sekolah-sekolah ada umumnya,tetapi karena banyak permasalahan yang dialami oleh peserta didik khusus sangat beragam, maka dalam pelaksanaannya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional perlu adanya perubahan berupa penyelarasa sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Perubahan kurikulum dipakai oleh tim pelaksana kurikulum sekolah. Guru pendamping khusus sangat dibutuhkan disini dikarenakan sangat mengetahui bagaimana perkembangan ABK dalam menerima materi di ruangan kelas..

Peran guru pendamping khusus sangat diperhtiungkan dikarenakan menjadi penentu apakah anak pendidikan inklusif mampu atau tidak menerima pendidikan atau masih adanya masalah yang membuat anak berkebutuhan menjadi terhambat dalam belajar.

Aksesibilitas sarana dan prasarana sekolah inklusif di Kota Payakumbuh ada dua macam yaitu aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas non fisik merupakan akses yang diperuntukan berkaitan dengan program atau sistem untuk seluruh orang untuk dapat keluar masuk dengan mudah berkaitan dengan program atau sistem ,sedangkan aksesibilitas fisik memiliki tujuan untuk mempermudah setiap peserta didik untuk masuk dan keluar dalam suatu lingkungan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, ada beberapa sekolah yang telah cukup sarana dan prasarananya dan ada sebagian lagi sekolah inklusif yang kurang dalam ketersediaan sarana dan prasarananya. Bagi sekolah inklusif yang kurang sarana dan prasarana disebabkan kurangnya dana pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Anggaran yang di anggarkan untuk pelaksanaan pendidikan inklusif masih kurang dan aturan dalam penganggaran tiap tahunnya pun masih belum jelas

1. Pemberian Kepercayaan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, ada sekolah yang tidak bisa menerima ABK karena belum mampu menyediakan GPK, ada beberapa sekolah inklusif yang menugaskan guru kelas sebagai GPK, dan ada sebagian sekolah yang mampu menyediakan guru pembimbing khusus yang pernah berkarir dari Pendidikan luar biasa. Dari pengamatan tersebut penulis dapat menilai bahwa kemampuan sekolah inklusif di Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif dalam memberdayakan ABK belum berjalan dengan baik. Hal ini akan berdampak kepada ABK itu sendiri.

Diperbantukannya guru reguler merangkap tugas menjadi GPK di sekolah inklusif yang memiliki banyak siswa berkebutuhan khusus menurut penulis sangatlah tidak efektif dan tidak maksimal dalam kinerjanya memberikan layanan pendampingan serta proses bimbingan kepada siswa berkebutuhan khusus tersebut. Guru tersebut tidak terlalu mengerti akan kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus, dan dalam kinerjanya melaksanakan tugas tidak berjalan maksimum karena ada yang bekerja tidak dengan sepenuh hati dan belum mengerti apa yang menjadi tugas dari guru pembimbing khusus. Setelah peneliti melakukan penelitian di beberapa sekolah inklusif di Kota Payakumbuh, peneliti menemukan bahwa adanya sikap positif dan negatif dari tenaga pendidik dalam mengajar, membina dan mendidik siswa termasuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus baik dari guru kelas, guru mata pelajaran ataupun guru pembimbing khusus di sekolah inklusif terhadap pendidikan inklusif tersebut. Adapun sikap/perilaku tenaga pendidik sekolah inklusif yang peneliti temukan antara lain:

1. Guru pembimbing khusus memiliki kedekatan yang lebih baik dengan anak berkebutuhan khusus karena guru pembimbing khusus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih terhadap anak berkebutuhan khusus, sedangkan guru reguler tidak terlalu dekat dengan anak berkebutuhan khusus karena kurang terbiasa dengan kehadiran mereka.
2. Guru lebih memilih mengajar siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus yang sudah bisa mandiri mengikuti proses belajar karena sebagian guru masih berpendapat bahwa anak berkebutuhan khusus akan sulit untuk ditangani dan sulit untuk mengerti akan pembelajaran yang diberikan guru tersebut.
3. Sebagian guru yang memiliki pemikiran bahwa dalam mengajar memiliki tingkat kesulitan dan kemudahan tersendiri lebih bisa menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tersebut.
4. Terkadang kehadiran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dapat mempengaruhi titik jenuh guru dalam mengajar, hal ini mengakibatkan guru tidak terlalu peduli dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus tersebut.
5. Guru yang mengajar karena keingintahuan untuk mendidik anak berkebutuhan khusus memiliki sikap yang lebih positif terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut.
6. Guru pembimbing khusus yang memiliki pengalaman di sekolah luar biasa memiliki kedekatan yang lebih dengan anak berkebutuhan khusus dan lebih bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut.
7. Guru yang memiliki kerabat anak berkebutuhan khusus lebih dekat dengan siswa yang berkebutuhan khusus karena guru tersebut memiliki keyakinan bahwa hak semua anak itu adalah sama.
8. Upaya Pemerintah dalam pemecahan masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif, Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 420.17/733/Wk-Pyk/2012 tentang Susunan Pengurus POKJA Inklusif Kota Payakumbuh pada tanggal 11 Desember 2012 dalam rangka pengoptimalan, kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Payakumbuh. Adapun pusat tempat pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Inklusif berada di SLBN Center Payakumbuh. Kelompok Kerja Inklusif Kota Payakumbuh mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan program pendidikan inklusif di Kota Payakumbuh.

Menyusun peraturan daerah/peraturan gubernur/peraturan bupati/peraturan walikota tentang pendidikan inklusif dan menyusun *grand design* penyelenggaraan pendidikan inklusif sehingga permasalahan dana dapat diatasi. Masyarakat diharap mampu memahami tentang manfaat dari pemberdayaan anak dan program pendidikan inklusif serta membantu dalam hal mempromosikan pola pendidikan, tujuan, dan manfaat pendidikan ini, sehingga pendidikan ini tidak dipandang sebelah mata, dan orang tua murid akan lebih percaya diri dalam menyekolahkan anaknya di sekolah Pendidikan Inklusif.

Pemerintah kabupaten/kota menyusun program kerja/kegiatan, melaksanakan dan memonitoring dan mengevaluasi serta melaporkan serangkaian program/kegiatan dalam rangka memberikan jaminan/dukungan/fasilitasi pada sekolah umum dan kejuruan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif agar anak berkebutuhan khusus dapat diberdayakan.

Dalam pelaksanaannya 148 jumlah sekolah negeri dan sekolah swasta di Kota Payakumbuh, 62 diantaranya adalah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Adanya sekolah inklusif adalah merata adanya di setiap kecamatan di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan penjelasan dan data di atas, jelaslah bahwa jumlah sekolah yang menjalani pendidikan Inklusif belum keseluruhan atau masih setengahnya sedangkan dalam memenuhi salah satu apa yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu setiap kabupaten/kota harus merata sehingga pemerintah perlu meningkatkan strategi terkhusus dari segi pendanaan agar penyelenggara sekolah inklusif menjadi lebih banyak dan menjadi leih efektif. Sehingga pemerintah akan terus gencar melaksanakan sosialisasi dalam rangka mewujudkan pemerataan sekolah inklusif di Kota Payakumbuh tentu saja ini tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh masyarakat dan orang tua anak berkebutuhan khusus itu sendiri.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis terhadap data-data yang diperoleh, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan anak berkebutuhan khusus melalui program pendidikan inklusif di Kota Payakumbuh belum berjalan dengan baik dilihat dari, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program pendidikan inklusif. Aturan yang mengatur tentang pendanaan dan penganggaran untuk program pendidikan inklusif juga belum jelas terkhusus aturan yang mengatur dana pembuatan sarana prasarana, sehingga terjadi kekurangan sarana prasarana. Guru dalam bersikap terhadap anak murid masih cenderung belum memiliki sifat yang sama GPK yang satu dengan lainnya. Permasalahan ini muncul dari faktor penghambat diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program pendidikan inklusif, belum jelasnya aturan yang pengatur tentang pendanaan dan penganggaran untuk program pendidikan inklusif serta belum jelasnya aturan yang mengatur pembuatan sarana prasarana. Kurangnya pelatihan terhadap GPK, yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program pendidikan inklusif di Kota Payakumbuh.
2. Upaya dalam mensukseskan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus pendidikan inklusif dalam memberdayakan ABK yaitu:
3. Pemerintah

Membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Payakumbuh dan dengan tujuan lebih memperjelas dan mempertegas bagaimana program pendidikan inklusif tersebut. Serta memperkuat dasar penganggaran sehingga pendanaan untuk mewujudkan sarana prasarana yang memadai sehingga pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik.

1. Sekolah penyelenggara dan Guru Pendamping Khusus

Meningkatkan kompetensi guru pendamping melalui kelompok guru pendamping, dan melakukan penyeleksian penerimaan guru pendamping khusus. Meningkatkan dan memaksimalkan fasilitas yang ada.

1. Masyarakat dan Orang Tua

Mengikuti dan mendukung sosialisasi dari pemerintah dengan tujuan untuk memahami pentingnya pendidikan khusus untuk meberdayakan anak berkebutuhan khusus.

**Saran**

Berdasarkan hasil yang telah dibahas dan telah ditarik kesimpulan yang penulis jelaskan, penulis menyarankan yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca. Adapun saran yang penulis berikan antara lain:

1. Pemerintah

Agar pemerintah lebih memperhatikan lagi apa yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif, mulai dari sosialisai yang tidak terkesan hanya sekedar formalitas dan menjadikan program pendidikan inklusif sebagai prioritas dalam penggunaan anggaran sehingga dapat menyediakan sarana prasarana yang memadai dan melakukan pengawasan dalam pengadaan sarana prasarana agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, lebih intensif dan cepat tanggap dalam menangani setiap permasalahan, dan lebih mensejahterakan para guru pendamping, serta mengawasi dan memperhatikan keberlanjutan program agar anak berkebutuhan khusus dapat diberdayakan dengan baik dan benar.

1. Sekolah penyelenggara dan Guru Pendamping Khusus.

Diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok guru pendamping khusus dilaksanakan dengan serius, terarah, dan tidak terkesan hanya sekedar formalitas, melalui cara penetapan dan persamaan pandangan tentang kurikulum dan standar pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, melalui pola diskusi di kelompok kerja tersebut. Serta berusaha memaksimalkan fasilitas yang ada, dan berusaha mengumpulkan dana melalui proposal bantuan dana kepada badan sosial yang berkaitan dengan berjalannya pemberdayaan anak berkebutuhan khusus.

1. Agar masyarakat dan semua pihak yang terkait bisa bekerja sama dalam mendukung, mengawasi serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus melalui program pendidikan inklusif di Kota Payakumbuh. Diharapkan juga partisipasi dari generasi muda dalam sosialisasi pendidikan inklusif melalui teknologi informasi seperti melalui instagram, video blog (vlog), facebook, twitter path dan media sosial lainnya agar pelaksanaan program pendidikan inklusif di Kota Payakumbuh dapat memberikan hasil yang baik bagi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A.BUKU-BUKU**

Ali, Madekhan 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Jakarta: Penerbit Averroes Press

Aan Komariah, Engkoswara. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Bafadal, Ibrahim. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara

Bryant, C. Dan White, Louis G. 1989. *Manajement Pembangunan*.Alih Bahasa: Budiman N.Editor. Jakarta LP3ES.

Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2004. *Pedoman Penyelenggaran Pendidikan Terpadi/Inklusi. Alat Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus, Dirjen Dikdasmen*, Departemen Pendidikan Nasional.

Herdiyansyah, H. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Ibrahim. 2015.  *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Irwanto, Kasim, & Rahmi 2010. Analisis *Situasi Penyan&g Disabilitas di Indonesia. Pusat Kajian Disabilitas*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial & Politik

Jannah, M. & Darmawanti, I. 2004. *Tumbuh Kembang Anak Usia Dini & Deteksi Dini pada Anak Berkebutuhan Khusus*. Surabaya: Insight Indonesia.

Herdiyansyah, H. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Mangunsong, F. 2009. Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Jilid I. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Kampus Baru UI, Depok

Mulyasa. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung. Remaja Rosda Karya.

Moh. Ali Aziz. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Moleong, L.J. 2007.  *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution. 2009. *Metode Research ( Penelitian Ilmiah* ). Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nazir, Moh. 2017. *Metode penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Rachmayana, Dadan. 2013. *Diantara Pendidikan Luar Biasa Menuju Anak Masa Depan yang Inklusif*. Luxima

Saleh, Chabib dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah,* Fokus Media: Bandung

Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Dan R&D. Bandung:Alfabeta

**B. Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Inklusif

**C. Sumber Lain**

https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/02/18/miefrs-748 anak-di-payakumbuh-ikuti-pendidikan-inklusif Senin 29 Oktober 2018

<http://izzaucon.blogspot.com/2014/06/modifikasi-atau-pengembangan-kurikulum.html> Kamis 17 Januari 2019